



RENSTRA 2025-2029

**KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

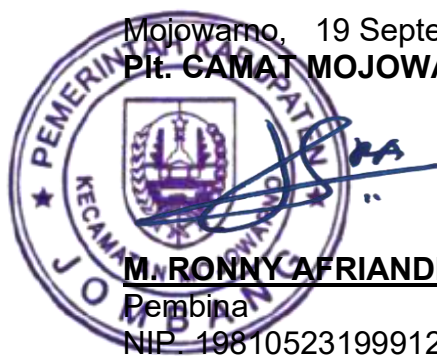
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025 – 2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan Mojowarno selama lima tahun ke depan. Renstra ini berfungsi sebagai acuan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah serta perwujudan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kecamatan sebagai perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini telah melalui proses identifikasi isu strategis, analisis situasi, penetapan tujuan dan sasaran, serta perumusan program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Kami juga mengupayakan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan melalui proses konsultasi dan koordinasi lintas sektor, demi menjamin keterpaduan dan sinergi pembangunan di tingkat kecamatan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra Kecamatan Mojowarno ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran demi penyempurnaan pelaksanaan perencanaan ke depan.

Mojowarno, 19 September 2025
Pt. CAMAT MOJOWARNO

M. RONNY AFRIANDIE., S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 198105231999121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai wujud implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersifat terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Mojowarno yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas, fungsi, serta program pembangunan kecamatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yang disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara terpadu oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, di tingkat pusat maupun daerah. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan

Secara teknis, penyusunan Renstra Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Tata Cara Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Permendagri ini memberikan pedoman dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk penyusunan Renstra Kecamatan agar memiliki arah, sasaran, serta program yang terukur dan akuntabel.

Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi landasan

operasional bagi Kecamatan dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah. Instruksi tersebut secara khusus mengarahkan agar perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan disusun secara selaras, terintegrasi, dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga peran Kecamatan sebagai perangkat daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 berpedoman pada:

- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah, serta
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai arah pembangunan jangka menengah yang menjadi rujukan utama bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Kecamatan Mojowarno

Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis sebagai rujukan resmi dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Mojowarno selama periode lima tahun, sehingga seluruh pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Melalui Renstra, Kecamatan Mojowarno mempertegas peran dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan. Renstra berfungsi untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Renstra menjamin keterpaduan antara kebijakan kecamatan dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, sehingga arah pembangunan lebih terkoordinasi dan sinergis. Selain itu, Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan, Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun internal perangkat daerah. Keterkaitan ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian dan kesinambungan arah pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Mojowarno adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L). Beberapa kebijakan sektoral dari Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan menjadi referensi dalam menyusun program dan kegiatan agar selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Mojowarno juga memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tingkat provinsi
3. Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Mojowarno merupakan dokumen turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Jombang. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mojowarno harus mendukung pencapaian visi-misi dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan kecamatan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Jombang.
4. Keterkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang.
Renja PD yang merupakan penjabaran dari Renstra akan berkontribusi langsung dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jombang. Dengan demikian, keterkaitan antara Renstra, Renja PD, dan RKPD akan membentuk siklus perencanaan tahunan yang selaras untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Jombang
5. Keterkaitan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari Renstra. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Mojowarno akan diterjemahkan secara rinci dan tahunan dalam dokumen Renja PD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang.
6. Keterkaitan dengan dengan Dokumen Rencana Wilayah/ Sektoral Lainnya . Selain itu, penyusunan Renstra Kecamatan Mojowarno juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen lain seperti Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045, serta kebijakan sektoral lainnya yang relevan.

Melalui keterpaduan dan sinkronisasi dengan berbagai dokumen perencanaan tersebut, Renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2025 -2029 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan, terarah, dan sistematis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Tahun 2025- 2029 disusun dengan mendasar kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah

- (PP) Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12/A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang 2025-2029;
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 10);

24. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 000.7.2/100/415.01/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025- 2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mojowarno dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi dasar perumusan kebijakan, penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Mojowarno, agar terarah, efektif, dan efisien. Renstra ini juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Renstra, arah pembangunan Kecamatan Mojowarno dapat disusun secara terstruktur dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Jombang

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Mojowarno secara strategis selama periode lima tahun, dengan memperhatikan potensi wilayah, permasalahan, serta aspirasi masyarakat
2. Mewujudkan keselarasan dan sinergi antara perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Jombang, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah
3. Menjadi acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Mojowarno, baik perangkat kecamatan, pemerintah desa, maupun mitra pembangunan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala
5. Mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dengan memperhatikan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas,

sehingga hasil pembangunan benar-benar bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antara dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2025-2029

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan beberapa subbab tentang : (i) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang digambarkan melalui penyajian data : tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat daerah ;Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Layanan; serta Mitra Perangkat daerah dalam pemberian pelayanan. (ii) Permasalah dan Isu strategis Perangkat Daerah yang mencakup : Permasalahan Pelayanan Perangkat Dearah; Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Rencana tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Isu Strategis Global, Nasional maupun Regional yang relevan dengan Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan .

Bab ini menyajikan beberapa subbab yaitu : (i) Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. (ii) Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah penentuannya didasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya serta Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029 (iii) Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Subbab ini juga memuat penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (iv) Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

Bab ini menyajikan (i) program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif. Dimana Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya . Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD yang disajikan dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030. (ii) Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah. (iii) Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. (iv) Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Bab VIII Penutup.

Bab ini Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan perangkat daerah pada tingkat kecamatan merupakan ujung tombak pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai program serta pelayanan administrasi kepada warga di wilayah kerjanya.

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh kecamatan mencakup aspek administratif, sosial, kependudukan, perizinan tertentu, serta fasilitasi pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kecamatan juga memiliki fungsi koordinatif terhadap kelurahan atau desa serta unit pelayanan teknis dari perangkat daerah lainnya.

Pelayanan di kecamatan dituntut untuk berjalan efektif, cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sistem pelayanan berbasis digital, serta sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan juga harus mampu merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara adaptif dan solutif, agar tercipta kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah daerah.

Selama periode pelaksanaan Renstra, kecamatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya melalui berbagai inovasi pelayanan publik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojowarno

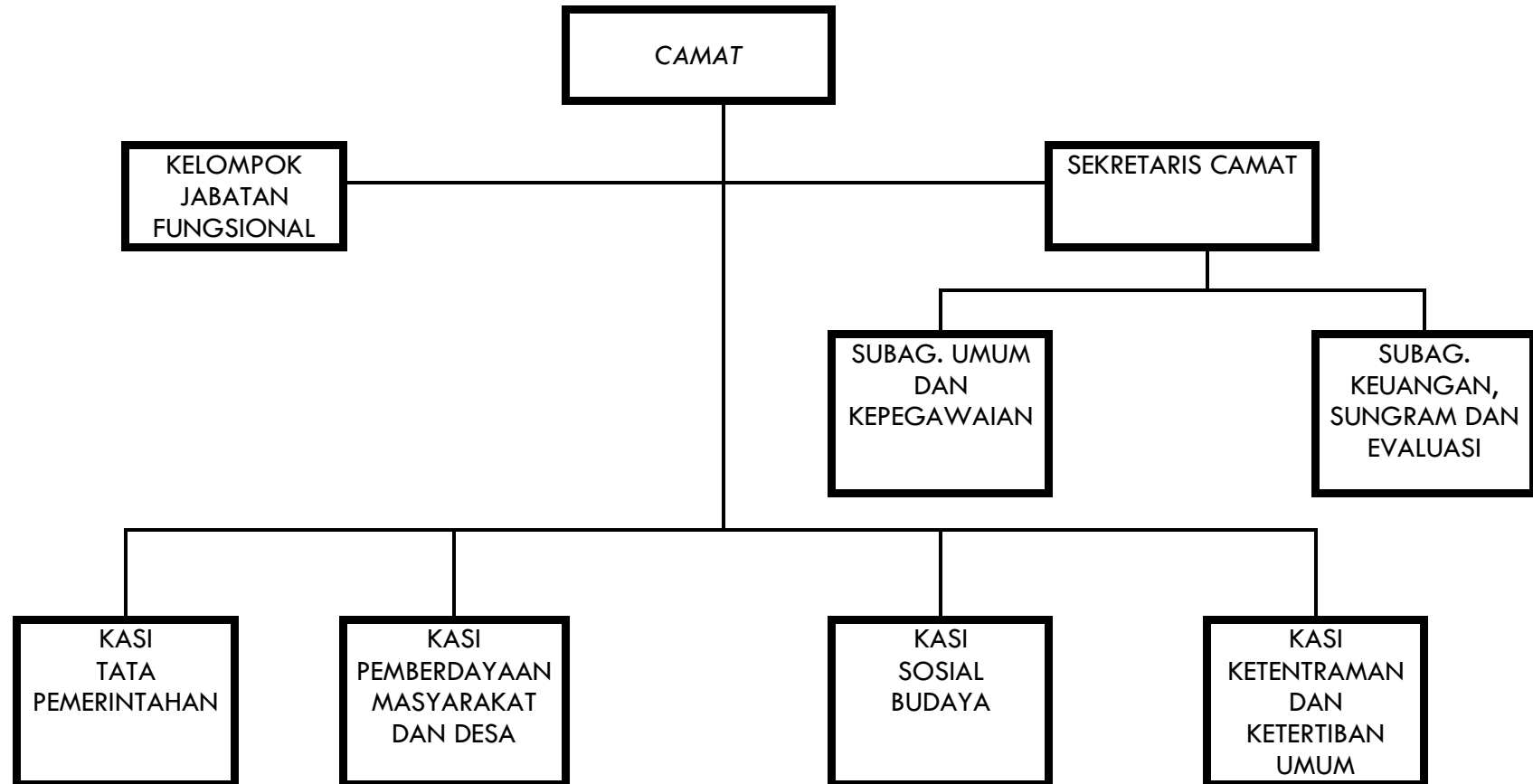
Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Mojowarno dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Kecamatan Mojowarno mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan terakhir kalinya atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan organisasi Kecamatan Mojowarno terdiri dari

- a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - e. Seksi Sosial Budaya.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Mojowarno



Sumber : Perbub 45/2019

(1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok yaitu tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

(1) Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat dibantu oleh :

- 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
 - d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - f. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Operasional Pelayanan Minimal;
 - h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
 - i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan;
 - j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja laporan pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2). Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(3).Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(4). Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(5). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(6). Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan pasal 4 ayat (4) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Mojowarno

Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat Pendidikan. Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kecamatan Mojowarno di tahun 2025 ditinjau dari tingkat golongan, jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2 Orang
2	Golongan III	10 Orang
3	Golongan II	3 Orang
4	Golongan I	0 Orang
5	Honorer	4 Orang

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan/ Kepangkatan di atas dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Mojowarno yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 10 orang (52,63% dari seluruh pegawai Kantor Kecamatan Mojowarno)

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1 Orang
2	Eselon IV	6 Orang
3	Pelaksana	12 Orang

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan di atas dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Mojowarno yang terbanyak adalah pelaksana ,sebanyak 12 orang (63,15% dari seluruh pegawai)

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	3 Orang
2	Sarjana S1	8 Orang

3	Diploma III	0 Orang
4	SLTA	7 Orang
5	SLTP	1 Orang
6	SD	0 Orang

Sumber : Data Kecamatan Mojowarno

Dari tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari pegawai Kecamatan Mojowarno yang terbanyak adalah berpendidikan S-I sebanyak 8 orang (42,10% dari seluruh pegawai Kantor Kecamatan Mojowarno)

Tabel 2.4

Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh

No	Sumber Daya Manusia	Jenis Diklat		
		Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1.	Struktural (7 Orang)	4 Sertifikat	0	0
2.	Fungsional (0 Orang)	0	0	0
3.	Staf (12 Orang)	0	0	0

Sumber: Data DUK

Saat ini Kecamatan Mojowarno menempati gedung kantor Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Kecamatan Mojowarno untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 231 buah Sarana dan prasarana Kerja yang tersedia di Kecamatan Mojowarno.

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana beserta Kondisinya

No	Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik	
2	Portable Generating Set	1	Baik	

3	Pompa Air	1	Baik	
4	Station Wagon	2	Baik	
5	Sepeda Motor	38	Baik	
6	Lemari Kayu	11	Baik	
7	Rak Kayu	2	Baik	
8	Filling Cabinet Besi	2	Baik	
9	Lemari Kaca	4	Baik	
10	CCTV – Camera Control Television System	1	Baik	
11	Papan Visual/Papan Nama	1	Baik	
12	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
13	Mesin Absensi	1	Baik	
14	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
15	Mesin Antrian	1	Baik	
16	Kursi Besi/Metal	10	Baik	
17	Kursi Kayu	5	Baik	
18	Meja Rapat	2	Baik	
19	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	
20	Meja Resepsionis	2	Baik	
21	Meja Panjang	8	Baik	
22	Meja 1/2 Biro	10	Baik	
23	Sketsel	1	Baik	
24	Kursi Rapat	8	Baik	
25	Kursi Tamu	1	Baik	
26	Bangku Tunggu	4	Baik	
27	Sofa	2	Baik	
28	Meubeleur lainnya	1	Baik	
29	Jam Mekanis	1	Baik	

30	A.C. Window	1	Baik	
31	A.C. Split	7	Baik	
32	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Baik	
33	Televisi	2	Baik	
34	Sound System	2	Baik	
35	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik	
36	Tiang Bendera	1	Baik	
37	Alat Pemadam/Portable	4	Baik	
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik	
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik	
41	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	Baik	
42	Camera Electronic	1	Baik	
43	Layar Film/Projector	2	Baik	
44	Video Conference	1	Baik	
45	Kursi Dorong	1	Baik	
46	Alat Kedokteran umum lainnya	1	Baik	
47	Meja Kerja	1	Baik	
48	P.C Unit	9	Baik	
49	Lap Top	13	Baik	
50	Note Book	2	Baik	
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Baik	
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
53	Wireless Access Point	2	Baik	
54	Acces Point	2	Baik	
55	Peralatan Komputer lainnya	2	Baik	
56	Peralatan Permainan lainnya	2	Baik	

57	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Baik	
58	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	Baik	
59	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lain-lain (dst)	1	Baik	
60	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	Baik	
61	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	Baik	
62	Pahatan Batu	1	Baik	
63	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	Baik	

2.1.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Mojowarno sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah kecamatan melaksanakan tugas pokok berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014. Tugas tersebut mencakup penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selama periode 2020–2024, Kecamatan Mojowarno telah melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Pelaksanaan pelayanan difokuskan pada upaya mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan fasilitasi pembangunan desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Mojowarno dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojowarno Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian PadaTahun Ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM		√		83,46	N/A	N/A	N/A	N/A	85,02	N/A	N/A	N/A	N/A	101,87	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kecamatan MOJOWARNO Minimal Baik				63	N/A	N/A	N/A	N/A	62,16	N/A	N/A	N/A	N/A	95,63	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	N/A	N/A	95,45	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Nilai Evaluasi SAKIP				63,26	N/A	N/A	N/A	N/A	61,96	N/A	N/A	N/A	N/A	97,94	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				90	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	111,11	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				18	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah kendaraan dinas				0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A

12	Jumlah pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				10	N/A	N/A	N/A	N/A	23	N/A	N/A	N/A	N/A	230,00	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukung yang dipelihara				3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				10	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				42	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah dokumen Renstra Kec. Mojowarno				1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah dokumen Renja Kec. Mojowarno				1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah dokumen LKJiP kec. Mojowarno				2	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Mojowarno				1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Persentase pemenuhan lahan untuk gedung kantor penunjang pelayanan administrasi perkantoran				100	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Luas lahan yang tersedia				6000	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A
24	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		√		N/A	66	73,39	N/A	N/A	N/A	60,89	61,81	N/A	N/A	N/A	92,26	84,22	N/A	N/A
25	Nilai Evaluasi SAKIP				N/A	70,01	71,60	N/A	N/A	N/A	70,79	73,47	N/A	N/A	N/A	101,11	102,61	N/A	N/A

26	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	94,12	93,26	N/A	N/A	N/A	94,12	93,26	N/A	N/A
27	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
28	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun				N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
29	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
30	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
31	<i>Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
32	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup kec mojawarno yang di fasilitasi				N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
33	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	0	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
34	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
35	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojowarno</i>				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
36	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	0	17	N/A	N/A	N/A	0	17	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
37	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
38	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi				N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
39	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

40	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	11	0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
41	Jumlah pemenuhan Barang Cetak				N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	150	150	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
42	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	7500	7915	N/A	N/A	N/A	7500	7915	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
43	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
44	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	2	1	N/A	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
45	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
46	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
47	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	8	2	N/A	N/A	N/A	8	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
48	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
49	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
50	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum				N/A	4	3	N/A	N/A	N/A	4	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
51	<i>Jumlah penyediaan benda pos</i>				0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	<i>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	4	2	N/A	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
54	2. . Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				N/A	24	6	N/A	N/A	N/A	24	6	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

55	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD kecamatan mojawarno yang dipelihara				N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
56	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				N/A	16	11	N/A	N/A	N/A	16	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
57	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	7,35	7,50	N/A	N/A	N/A	7,86	5,167	N/A	N/A	N/A	106,94	0,68	N/A	N/A
58	<u>IKM Kecamatan</u>				N/A	87,00	89,50	N/A	N/A	N/A	89,17	90,54	N/A	N/A	N/A	102,49	101,16	N/A	N/A
59	<u>IPP Kecamatan</u>				N/A	3,50	3,54	N/A	N/A	N/A	3,407	0,64	N/A	N/A	N/A	97,34	18,08	N/A	N/A
60	Nilai Paten Kecamatan				N/A	66	71	N/A	N/A	N/A	62,16	64,65	N/A	N/A	N/A	94,18	91,06	N/A	N/A
61	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
62	1. Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
63	2. Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
64	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
65	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
66	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
67	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
68	<i>Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan</i>				N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
69	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	0	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
70	<u>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</u>				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
71	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
72	<i>Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum</i>				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
73	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>				N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

74	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
75	1. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
76	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
77	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
78	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
79	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
80	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
81	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
82	<i>1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
83	<i>2. . Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
84	<i>1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa</i>				N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
85	<i>2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan</i>				N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
86	<i>3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan</i>				N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
87	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		√		N/A	N/A	N/A	76	N/A	N/A	N/A	N/A	74,88	N/A	N/A	N/A	N/A	98,52	N/A
88	Nilai Evaluasi SAKIP				N/A	N/A	N/A	74,59	N/A	N/A	N/A	N/A	77,14	N/A	N/A	N/A	N/A	103,42	N/A
89	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,10	N/A	N/A	N/A	N/A	100,1	N/A

90	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
91	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
92	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
93	<i>1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
94	<i>2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
95	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	84,21	N/A
96	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
97	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
98	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno</i>				N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
99	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
100	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
101	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

102	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
103	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
104	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
105	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
106	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
107	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
108	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
109	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	37	N/A	N/A	N/A	N/A	1850	N/A
110	<i>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
112	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
114	<i>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
115	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
116	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

117	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	66,66	N/A
118	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	N/A	N/A	7,65	N/A	N/A	N/A	N/A	8,15	N/A	N/A	N/A	N/A	106,53	N/A
119	IKM Kecamatan				N/A	N/A	N/A	91,00	N/A	N/A	N/A	N/A	94,52	N/A	N/A	N/A	N/A	103,87	N/A
120	IPP Kecamatan				N/A	N/A	N/A	3,60	N/A	N/A	N/A	N/A	3,42	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00	N/A
121	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	85	N/A	N/A	N/A	N/A	92,69	N/A	N/A	N/A	N/A	109,04	N/A
122	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
123	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
124	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
125	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
126	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
127	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
128	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
129	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
130	<u>Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait</u>				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A
131	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	N/A	100	N/A
132	<i>Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan</i>				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
133	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A

	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.																		
134	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
135	1. Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
136	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
137	<i>Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa</i>				N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
138	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
139	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
140	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
141	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
142	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
143	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
148	INDEKS REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN		√		N/A	N/A	N/A	N/A	61,80	N/A	N/A	N/A	N/A	76,93	N/A	N/A	N/A	N/A	124,48
149	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno				N/A	N/A	N/A	N/A	77,25	N/A	N/A	N/A	N/A	77,44	N/A	N/A	N/A	N/A	100,24
150	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100,05	N/A	N/A	N/A	N/A	100,05
151	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100

152	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	66,66
152	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
154	1. <i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
155	2. <i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
156	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	94,11
157	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
158	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
159	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
160	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	66,66
161	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
162	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	8,33
163	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100
164	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	50
165	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100

166	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	17	N/A	N/A	N/A	N/A	21,25
167	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	16,66
168	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
169	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
170	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	600
171	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
172	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	100
173	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	96
174	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0
175	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
176	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	7	N/A	N/A	N/A	N/A	7	N/A	N/A	N/A	N/A	100
177	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	100
178	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	120
179	INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN				N/A	N/A	N/A	N/A	62,00	N/A	N/A	N/A	N/A	86,20	N/A	N/A	N/A	N/A	139,03

180	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MOJOWARNO		√		N/A	N/A	N/A	N/A	8,16	N/A	N/A	N/A	N/A	8,53	N/A	N/A	N/A	N/A	104,5 3
181	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	92,70	N/A	N/A	N/A	N/A	85,61	N/A	N/A	N/A	N/A	92,35
182	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
183	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100
184	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
185	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
186	<i>Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100
187	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
188	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	45	N/A	N/A	N/A	N/A	90
189	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
190	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
191	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
192	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	100

	Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.																		
193	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
194	<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	100
195	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100
196	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
197	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	100
198	<i>Jumlah Desa yang menyusun RKPDes</i>				N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	100
199	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100
200	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	114	N/A	N/A	N/A	N/A	114	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Analisis capaian kinerja pelayanan ini disusun sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2020-2024. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Mojowarno mengacu pada beberapa dokumen perencanaan strategis, dimana Perubahan-perubahan Renstra tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional terkait penataan perencanaan pembangunan daerah, khususnya terkait dengan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan antara lain:

a) Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2018-2023

Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 adalah mendasar pada Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2018 – 2023, dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020 telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pelayanan administrasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sepenuhnya dan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan berikutnya yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara dengan gap ketercapaian 50%, Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan pakaian dinas harian dengan gap ketercapaian 0%, Persentase pemenuhan lahan untuk gedung kantor penunjang pelayanan dengan gap ketercapaian 0%, Luas lahan yang tersedia dengan gap ketercapaian 0%. Hal ini dikarenakan adanya faktor keterbatasan anggaran dan prioritas penganggaran

b) Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 dan tahun 2022 adalah mengacu pada Renstra Perubahan Kecamatan Mojowarno Tahun 2018 – 2023 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Secara umum, Mayoritas pelayanan

dasar administrasi kecamatan dan dukungan pemerintahan desa telah tercapai 100%, Namun, aspek-aspek reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan aset kendaraan masih memerlukan perhatian khusus. Fluktuasi Nilai IKPP dan IPP: Indikator pelayanan publik menunjukkan penurunan drastis pada Tahun 2022 terdapat gap sangat besar, realisasi hanya 18,08% dari target dikarenakan ketika visitasi penilaian IPP dan PATEN ruang pelayanan PATEN masih dalam tahap rehabilitasi, sehingga penilaian IPP dan PATEN belum maksimal. Realisasi fisik terkait kendaraan dan sarana kantor : Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, baik dalam pemeliharaan kendaraan, pembayaran pajak, dimana inventarisasi asset belum optimal karena pada saat penyusunan dokumen renstra belum terdapat kebijakan hibah kepada Pemerintah desa terkait Mobil Siaga Desa. Realisasi makanan/minuman pegawai: Nol realisasi di tahun 2022 dikarenakan ada kebijakan efisiensi belanja operasional serta prioritas anggaran dialihkan untuk penanganan keadaan darurat pandemi covid-19

- c) Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di tahun 2023 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik hingga sangat baik, dengan capaian mayoritas indikator berada di angka 100%, meskipun ada beberapa indikator dengan capaian kurang optimal. Sebagian besar indikator kinerja layanan publik seperti IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Nilai PATEN, Evaluasi APBDes tercapai bahkan melebihi target (di atas 100%), terdapat indikator layanan yang menurun yaitu Penurunan IPP Kecamatan, Capaian IPP tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan, Terdapat gap realisasi IPP sebesar 0,18 poin di bawah target hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, belum adanya system informasi pendukung operasional

pelayanan public, serta belum dilakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala. Selain itu adanya perubahan mekanisme dan pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan PEKPP, dari yang sebelumnya menggunakan pedoman Permenpan 17/2017 beralih ke pedoman Permenpan 5/2023.

d) Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2024-2026

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di tahun 2024 mengacu pada Renstra Tahun 2024- 2026. Secara umum, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojowarno Tahun 2024 menunjukkan hasil cukup baik, dengan sebagian besar indikator mencapai 100%, khususnya untuk aspek administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Pada tahun 2023, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Mojowarno tercapai sebesar 77,44 atau 100,24% dari target yang ditetapkan sebesar 77,25. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 tercapai sebesar 8,53 atau 104,53% dari target yang ditetapkan sebesar 8,16. Capaian ini sangat melebihi target, yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Gap kesenjangan terjadi pada indikator Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, dan Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur dikarenakan keterbatasan anggaran.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojowarno Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan MOJOWARNO	171.430.000	N/A	N/A	N/A	N/A	82.980.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95,63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	51.585.000	N/A	N/A	N/A	N/A	32.015.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95,45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.040.000	N/A	N/A	N/A	N/A	13.112.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	27.125.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	45.705.000	N/A	N/A	N/A	N/A	10.727.500	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	238.473.000	N/A	N/A	N/A	N/A	194.076.955	N/A	N/A	N/A	N/A	111,11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelayanan Administrasi Perkantoran	238.473.000	N/A	N/A	N/A	N/A	194.076.955	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100.237.400	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional		N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	45.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	47.277.600	N/A	N/A	N/A	N/A	230,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	50.047.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	7.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	7.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.112.800	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	15.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	64.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.910.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan rencana strategis SKPD	25.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan rencana kerja SKPD	17.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.375.000	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	17.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan laporan keuangan SKPD	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.535.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Peningkatan Fasilitas/koordinasi administrasi pemerintahan	2.000.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Tanah	2.000.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	3.033.088.845	2.596.912.355	N/A	N/A	N/A	2.428.170.622	2.513.570.123	N/A	N/A	N/A	80,06	96,79	N/A	N/A	-0,46	-0,51
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	N/A	5.724.000	1.838.800	N/A	N/A	N/A	5.724.000	1.816.550	N/A	N/A	N/A	100	98,79	N/A	N/A	-0,24	-0,24
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	4.505.000	1.238.800	N/A	N/A	N/A	4.505.000	1.216.550	N/A	N/A	N/A	100	98,20	N/A	N/A	-0,22	-0,21
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	N/A	1.219.000	600.000	N/A	N/A	N/A	1.219.000	600.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,33	0,33
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	N/A	2.538.915.245	2.175.573.905	N/A	N/A	N/A	1.948.900.253	2.102.035.304	N/A	N/A	N/A	76,76	96,62	N/A	N/A	-0,46	0,52
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	2.537.739.245	2.103.375.905	N/A	N/A	N/A	1.947.724.253	2.029.837.304	N/A	N/A	N/A	76,75	96,50	N/A	N/A	-0,45	0,51
Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	-	71.598.000	N/A	N/A	N/A	-	71.598.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	1,00	1,00
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1.176.000	600.000	N/A	N/A	N/A	1.176.000	600.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,34	-0,34
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	1,00	1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Subkegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	5.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	1,00	1,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	93.766.000	24.665.050	N/A	N/A	N/A	82.818.100	24.655.725	N/A	N/A	N/A	88,32	99,96	N/A	N/A	-0,21	-0,23
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	622.000	1.531.000	N/A	N/A	N/A	622.000	1.530.125	N/A	N/A	N/A	100	99,94	N/A	N/A	0,71	0,71
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	7.282.600	12.653.550	N/A	N/A	N/A	7.282.600	12.611.200	N/A	N/A	N/A	100	99,98	N/A	N/A	0,63	0,63
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	73.080.000	0	N/A	N/A	N/A	63.592.500	0	N/A	N/A	N/A	87,02	N/A	N/A	N/A	-1,00	-1,00
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	2.550.000	3.124.500	N/A	N/A	N/A	2.550.000	3.124.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,55	0,55
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	2.352.000	2.220.000	N/A	N/A	N/A	2.352.000	2.220.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,49	-0,49
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	7.880.000	5.176.000	N/A	N/A	N/A	6.419.000	5.170.000	N/A	N/A	N/A	81,46	99,88	N/A	N/A	-0,40	-0,45
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	53.727.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	53.448.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	99,48	100	N/A	N/A	-0,21	0,72
Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	53.727.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	53.448.000	14.000.000	N/A	N/A	N/A	99,48	100	N/A	N/A	-0,21	-0,21
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	110.808.000	89.026.000	N/A	N/A	N/A	109.426.969	85.214.801	N/A	N/A	N/A	98,75	95,72	N/A	N/A	-0,45	-0,44
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	16.020.000	22.176.000	N/A	N/A	N/A	15.987.368	19.367.629	N/A	N/A	N/A	99,80	87,34	N/A	N/A	-0,58	0,55

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	94.788.000	66.850.000	N/A	N/A	N/A	93.439.601	65.847.172	N/A	N/A	N/A	98,58	98,50	N/A	N/A	-0,41	-0,41
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	230.148.000	286.708.600	N/A	N/A	N/A	227.853.300	280.795.400	N/A	N/A	N/A	99,00	97,94	N/A	N/A	0,55	0,55
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	41.196.000	45.131.200	N/A	N/A	N/A	40.711.300	44.203.703	N/A	N/A	N/A	98,82	97,94	N/A	N/A	0,52	0,52
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	181.752.000	226.957.400	N/A	N/A	N/A	179.942.000	221.987.040	N/A	N/A	N/A	99,00	97,81	N/A	N/A	0,56	0,55
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	7.200.000	14.620.000	N/A	N/A	N/A	7.200.000	14.605.000	N/A	N/A	N/A	100	99,90	N/A	N/A	0,67	0,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,20	-0,20
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,20	-0,20
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	17.077.900	4.200.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,20	-0,20
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,45	-0,45
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,45	-0,45

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	29.564.500	24.165.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,45	-0,45
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,37	-0,37
<i>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,37	-0,37
Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	7.900.000	4.650.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,37	-0,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,08	-0,08
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	1.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,08	-0,08
Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan ketahanan nasional Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional	N/A	17.357.600	750.000	N/A	N/A	N/A	17.357.600	750.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-0,04	-0,04
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	N/A	0	750.000	N/A	N/A	N/A	0	750.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	1,00	1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pimpinan di Kecamatan																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	0,69	0,69
<i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	0,69	0,69
Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	5.550.000	12.437.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	0,69	0,69
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	2.456.005.299	N/A	N/A	N/A	N/A	2.459.405.950	N/A	N/A	N/A	N/A	100,14	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	5.356.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.655.000	N/A	N/A	N/A	N/A	49,57	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	4.656.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1.955.000	N/A	N/A	N/A	N/A	41,99	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	2.172.193.299	N/A	N/A	N/A	N/A	2.004.971.943	N/A	N/A	N/A	N/A	92,30	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	2.099.89 5.299	N/A	N/A	N/A	N/A	1.93 2.67 3.94 3	N/A	N/A	N/A	N/A	92,04	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	71.598.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	71.5 98.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	700. 000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	99.731.8 00	N/A	N/A	N/A	N/A	76.9 82.5 00	N/A	N/A	N/A	N/A	77,19	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	12.184.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	12.4 04.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	101,81	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	48.400.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	35.1 00.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	72,52	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	5.632.80 0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.88 6.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	86,75	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	2.352.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.35 2.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	28.822.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	19.9 00.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	69,04	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	2.341.000	N/A	N/A	N/A	N/A	2.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,96	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	26.162.929	N/A	N/A	N/A	N/A	201.448.000	N/A	N/A	N/A	N/A	769,97	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	26.162.929	N/A	N/A	N/A	N/A	201.448.000	N/A	N/A	N/A	N/A	769,97	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	89.233.671	N/A	N/A	N/A	N/A	90.707.775	N/A	N/A	N/A	N/A	101,65	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	20.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	24.399.439	N/A	N/A	N/A	N/A	119,02	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	68.733.671	N/A	N/A	N/A	N/A	66.308.336	N/A	N/A	N/A	N/A	96,47	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	63.327.600	N/A	N/A	N/A	N/A	82.640.732	N/A	N/A	N/A	N/A	130,50	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	38.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.733.732	N/A	N/A	N/A	N/A	99,17	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	9.197.60 0	N/A	N/A	N/A	N/A	34.1 87.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	371,69	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	16.080.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	10.7 20.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	66,67	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	5.750.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	5.74 9.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	5.750.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	5.74 9.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanna Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	5.750.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	5.74 9.50 0	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	31.832.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	31.8 32.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	31.832.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	31.8 32.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	26.257.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	26.2 57.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	5.575.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	5.57 5.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	17.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	13.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	56.772.000	N/A	N/A	N/A	N/A	56.768.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	56.772.000	N/A	N/A	N/A	N/A	56.768.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	56.772.000	N/A	N/A	N/A	N/A	56.768.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99,99	N/A	N/A	N/A
INDEKS REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.951.351.277	N/A	N/A	N/A	N/A	2.382.972.941	N/A	N/A	N/A	N/A	80,74	N/A	N/A
<u>Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	2.951.351.277	N/A	N/A	N/A	N/A	2.382.972.941	N/A	N/A	N/A	N/A	80,74	N/A	N/A
Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	2.951.351.277	N/A	N/A	N/A	N/A	2.382.972.941	N/A	N/A	N/A	N/A	80,74	N/A	N/A
<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	9.575.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.753.000	N/A	N/A	N/A	N/A	39,20	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	6.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.053.000	N/A	N/A	N/A	N/A	44,25	N/A	N/A
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realiasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.675.000	N/A	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	26,17	N/A	N/A
1. <i>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	2.442.293.777	N/A	N/A	N/A	N/A	1.996.179.033	N/A	N/A	N/A	N/A	81,73	N/A	N/A
2. <i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.368.19 5.777	N/A	N/A	N/A	N/A	1.919. 801.03 3	N/A	N/A	N/A	N/A	81,07	N/A	N/A
Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	75.678 .000	N/A	N/A	N/A	N/A	105,7 0	N/A	N/A
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.500.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	700.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	28,00	N/A	N/A
Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno	N/A	N/A	N/A	N/A	5.700.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.700.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	99.179.3 00	N/A	N/A	N/A	N/A	71.501 .749	N/A	N/A	N/A	N/A	72,09	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	19.559.5 00	N/A	N/A	N/A	N/A	12.073 .000	N/A	N/A	N/A	N/A	61,72	N/A	N/A
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	45.980.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	31.960 .000	N/A	N/A	N/A	N/A	69,51	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.342.80 0	N/A	N/A	N/A	N/A	3.420. 000	N/A	N/A	N/A	N/A	53,92	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.220.00 0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.352. 000	N/A	N/A	N/A	N/A	105,9 5	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	22.736.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	18.497 .749	N/A	N/A	N/A	N/A	81,36	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.341.000	N/A	N/A	N/A	N/A	3.199.000	N/A	N/A	N/A	N/A	136,65	N/A	N/A
Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	226.779.200	N/A	N/A	N/A	N/A	131.905.250	N/A	N/A	N/A	N/A	81,81	N/A	N/A
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	65.553.300	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	161.225.900	N/A	N/A	N/A	N/A	131.905.250	N/A	N/A	N/A	N/A	81,81	N/A	N/A
<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	96.790.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.188.285	N/A	N/A	N/A	N/A	98,35	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	24.540.000	N/A	N/A	N/A	N/A	29.055.300	N/A	N/A	N/A	N/A	118,40	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	72.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	66.132.980	N/A	N/A	N/A	N/A	91,53	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A
<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	71.034.000	N/A	N/A	N/A	N/A	73.645.624	N/A	N/A	N/A	N/A	103,68	N/A	N/A
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	N/A	N/A	N/A	48.652.000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.914.524	N/A	N/A	N/A	N/A	77,93	N/A	N/A
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	9.222.000	N/A	N/A	N/A	N/A	26.102.100	N/A	N/A	N/A	N/A	283,04	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	13.160.000	N/A	N/A	N/A	N/A	9.629.000	N/A	N/A	N/A	N/A	73,17	N/A	N/A
INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN	N/A	N/A	N/A	N/A	172.079.000	N/A	N/A	N/A	N/A	155.326.500	N/A	N/A	N/A	N/A	90,26	N/A	N/A
INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MOJOWARNO	N/A	N/A	N/A	N/A	172.079.000	N/A	N/A	N/A	N/A	155.326.500	N/A	N/A	N/A	N/A	90,26	N/A	N/A
Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	10.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.762.500	N/A	N/A	N/A	N/A	65,98	N/A	N/A
Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	10.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.762.500	N/A	N/A	N/A	N/A	65,98	N/A	N/A
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	10.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.762.500	N/A	N/A	N/A	N/A	65,98	N/A	N/A
Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	44.914.500	N/A	N/A	N/A	N/A	69.821.000	N/A	N/A	N/A	N/A	155,45	N/A	N/A
Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti																	
Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	44.914.500	N/A	N/A	N/A	N/A	69.821.000	N/A	N/A	N/A	N/A	155,45	N/A	N/A
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam																	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	31.414.500	N/A	N/A	N/A	N/A	27.521.000	N/A	N/A	N/A	N/A	87,61	N/A	N/A
Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	13.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	42.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	313,33	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	19.012.500	N/A	N/A	N/A	N/A	8.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	46,81	N/A	N/A
<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	19.012.500	N/A	N/A	N/A	N/A	8.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	46,81	N/A	N/A
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	N/A	N/A	N/A	N/A	19.012.500	N/A	N/A	N/A	N/A	8.900.000	N/A	N/A	N/A	N/A	46,81	N/A	N/A
Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	32.787.500	N/A	N/A	N/A	N/A	16.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51,77	N/A	N/A
<i>Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	32.787.500	N/A	N/A	N/A	N/A	16.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51,77	N/A	N/A
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	32.787.500	N/A	N/A	N/A	N/A	16.975.000	N/A	N/A	N/A	N/A	51,77	N/A	N/A
Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	65.114.500	N/A	N/A	N/A	N/A	52.868.000	N/A	N/A	N/A	N/A	81,19	N/A	N/A
<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	65.114.500	N/A	N/A	N/A	N/A	52.868.000	N/A	N/A	N/A	N/A	81,19	N/A	N/A

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Jumlah Desa yang menyusun RKPDes</i>																	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	42.287.500	N/A	N/A	N/A	N/A	36.862.500	N/A	N/A	N/A	N/A	87,17	N/A	N/A
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	22.827.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.005.500	N/A	N/A	N/A	N/A	70,12	N/A	N/A

Kerangka pendanaan Kecamatan Mojowarno selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam tabel tersebut diatas, telah disusun sebagai acuan pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara pagu anggaran yang direncanakan dalam Renstra dengan realisasi anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a) Realisasi dan anggaran tahun 2020

Pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojowarno Tahun 2021 mencapai 100,14%. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan capaian pelaksanaan yang baik, meskipun terdapat beberapa deviasi anggaran, baik yang melebihi maupun yang tidak terealisasi. Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan sebagian besar terlaksana dengan realisasi mendekati 100%, seperti kegiatan fasilitasi pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan di Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur juga mengalami deviasi realisasi yang cukup signifikan, misalnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dengan realisasi 230%, serta Pemeliharaan Gedung Kantor yang realisasinya mencapai 500% dari pagu awal. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan mendesak pemeliharaan fisik kantor.

b) Realisasi dan anggaran tahun 2021-2022

Pada Tahun 2021, realisasi anggaran mencapai 100,14%. Capaian tersebut menunjukkan adanya pelampauan realisasi anggaran yang sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan tambahan operasional yang tertampung dalam perubahan anggaran. Selanjutnya, pada Tahun 2022, pendanaan dan realisasi anggaran menunjukkan konsistensi yang baik, di mana hampir seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan capaian realisasi mendekati atau mencapai 100%. Beberapa kegiatan mengalami deviasi realisasi, seperti pada Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, yang menunjukkan angka realisasi melebihi alokasi awal, sebagai akibat dari adanya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi

c) Realisasi dan anggaran tahun 2023

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojowarno Tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik yaitu sebesar 100,14%, yang menunjukkan adanya optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan

Realisasi dan anggaran tahun 2023. Beberapa sub kegiatan menunjukkan deviasi tinggi (melebihi 100%) yang merupakan hasil dari penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran (PAK) untuk memenuhi kebutuhan prioritas, seperti pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan bangunan

Pelaksanaan kerangka pendanaan Kecamatan Mojowarno Tahun 2023 secara umum menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang baik, dengan rata-rata rasio realisasi terhadap anggaran berada di atas 90%, bahkan terdapat beberapa kegiatan yang mencapai 100% realisasi, seperti pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta berbagai kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, Sebaliknya, ada pula kegiatan dengan realisasi rendah, seperti Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan rasio realisasi 41,99%, serta beberapa sub kegiatan administrasi umum yang realisasinya di bawah 80%.

d) Realisasi dan anggaran tahun 2024

Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik pada program-program yang bersifat rutin dan telah memiliki pola pelaksanaan yang jelas. Namun, pada program-program baru atau yang memerlukan koordinasi lintas sektor, capaian realisasinya cenderung lebih rendah. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan dinamika kebutuhan aktual di lapangan.

Rasio antara anggaran dan realisasi disebabkan oleh beberapa faktor berikut diantaranya Adanya kebijakan baru atau prioritas daerah yang berubah, Perubahan Harga dan Perkiraan Kebutuhan, adanya refocusing atau pergeseran anggaran di tengah tahun berjalan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas baru karena ada beberapa program yang sudah direncanakan ditunda atau dialihkan kepada program yang dianggap lebih prioritas sesuai perkembangan, Pada saat penyusunan Renstra, data kebutuhan atau estimasi pembiayaan belum sepenuhnya akurat.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 mengusung visi “Mewujudkan Jombang Maju dan

Sejahtera Untuk Semua”. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, Kecamatan Mojowarno berperan strategis dalam mendukung Isu Strategis Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Adaptif dan Inovatif Berbasis ICT serta Misi 6: Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif. Dukungan ini diarahkan untuk mencapai sasaran tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041 mengatur struktur ruang (pusat pelayanan, jaringan transportasi, dan infrastruktur) serta pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) di wilayah Jombang. Kecamatan Mojowarno diarahkan sebagai kawasan perdesaan berbasis pertanian dengan fungsi pendukung pusat kegiatan lokal (PKL), serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan perkotaan Jombang. Kecamatan Mojowarno termasuk dalam kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah- daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang tahun 2021-2041, Kecamatan Mojowarno merupakan kawasan strategis agropolitan yang berfungsi sebagai pusat agribisnis di wilayah Kabupaten Jombang, mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Jawa Timur Tahun 2023–2043 merupakan pedoman arah pembangunan wilayah Jawa Timur dalam jangka panjang, mencakup struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu fokus penting dari RTRW Provinsi Jawa Timur adalah pemerataan pembangunan antarwilayah serta pengembangan wilayah berbasis potensi lokal untuk mendukung daya saing daerah. Kecamatan Mojowarno yang berada di Kabupaten Jombang merupakan bagian dari kawasan pengembangan wilayah tengah Jawa Timur, yang diarahkan mendukung fungsi kawasan pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, serta penguatan infrastruktur pelayanan dasar. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 membuka peluang besar bagi Kecamatan Mojowarno untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi pembangunan desa. Namun demikian, tantangan dalam kesiapan sumber daya, dinamika sosial, serta koordinasi lintas sektor harus diantisipasi agar pelayanan kecamatan dapat semakin optimal dan adaptif terhadap arah pembangunan wilayah provinsi ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, isu strategis, misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, serta hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah Kecamatan Mojowarno, maka arah lokasi pengembangan pelayanan Kecamatan Mojowarno dalam lima tahun mendatang difokuskan pada:

1. Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan Mojowarno
 - Difokuskan sebagai sentra pelayanan administrasi pemerintahan yang mendukung penguatan kualitas pelayanan publik, baik secara fisik maupun digital. Pengembangan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana kantor dan pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi.
2. Wilayah Desa-Desa dengan Tingkat Aksesibilitas Pelayanan Rendah
 - Pelayanan difokuskan untuk menjangkau desa-desa dengan akses terbatas terhadap pelayanan administrasi dan pemerintahan. Pengembangan diarahkan untuk memastikan pelayanan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Kecamatan Mojowarno, terutama di wilayah perbatasan antar kecamatan.
3. Kawasan Pendukung Pengembangan Ekonomi Lokal
 - Seiring dengan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan sektor pertanian berbasis agro-minapolitan, arah pengembangan pelayanan diarahkan untuk mendukung desa-desa dengan potensi ekonomi produktif, seperti sentra pertanian, perdagangan lokal, dan UMKM.
4. Wilayah Terdampak Perkembangan Infrastruktur Strategis
 - Mengacu pada kebijakan RTRW Provinsi maupun Kabupaten yang mendorong pembangunan konektivitas wilayah, pengembangan pelayanan diarahkan pada kawasan-kawasan yang akan terdampak pembangunan infrastruktur strategis seperti jaringan jalan kolektor dan utilitas umum, guna mendukung konektivitas pelayanan antarwilayah.
5. Wilayah Potensi Implementasi Desa Digital
 - Sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis ICT sesuai misi RPJMD, pengembangan pelayanan diarahkan pada desa-desa yang memiliki kesiapan dan potensi dalam pengembangan desa digital,

sehingga pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dalam periode 2025–2029, Kemendagri mengarahkan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Fokus utamanya meliputi: penguatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas pemerintahan kewilayahan (termasuk kecamatan), serta penguatan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja berbasis outcome. Dalam konteks ini, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada pada level paling dekat dengan masyarakat diarahkan untuk menjadi garda terdepan pelayanan yang cepat, sederhana, dan menjangkau hingga tingkat desa.

Lebih lanjut, dalam Renstra Kementerian Desa PDTT, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan fasilitasi pembangunan berbasis potensi lokal. Bagi Kecamatan Mojowarno, arah kebijakan ini relevan karena peran Kecamatan sangat erat dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan sinergi program pembangunan antara desa dan kabupaten.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya Bappeda, Dinas PMD, Disdukcapil, dan Satpol PP, menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan mandat dan fungsi pelayanan Kecamatan Mojowarno. Bappeda Kabupaten Jombang mengarahkan perangkat daerah untuk berorientasi pada penguatan sistem perencanaan yang partisipatif dan berbasis data wilayah. Kecamatan sebagai unit yang menjangkau langsung desa-desa menjadi pelaksana utama dalam pengumpulan data perencanaan, validasi usulan masyarakat, serta fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan.

Sementara itu, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang memprioritaskan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, percepatan pelayanan publik berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas koordinasi antarwilayah. Fungsi ini selaras dengan tugas Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga menjadi dasar kuat bagi Kecamatan Mojowarno untuk mengembangkan layanan pembinaan kelembagaan desa, pelatihan pemerintahan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan antardesa.

Dalam Renstra Disdukcapil, fokus layanan diarahkan pada percepatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dan integrasi data kependudukan daerah. Kecamatan Mojowarno, yang menjalankan pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), menjadi perpanjangan tangan kabupaten dalam pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas layanan PATEN menjadi agenda penting dalam Renstra Kecamatan.

Kemudian dari sisi ketentraman dan ketertiban, Renstra Satpol PP menggarisbawahi pentingnya peran kecamatan dalam menjaga ketertiban umum, deteksi dini konflik sosial, serta koordinasi keamanan lingkungan bersama Forkopimcam. Hal ini memperkuat posisi Kecamatan Mojowarno sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan TNI/Polri, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam membangun stabilitas sosial di tingkat wilayah.

Dari keseluruhan hasil telaahan terhadap dokumen Renstra K/L dan Renstra PD Kabupaten Jombang tersebut, diperoleh gambaran bahwa tantangan pelayanan Kecamatan Mojowarno ke depan akan semakin kompleks. Kecamatan tidak lagi hanya sebagai penghubung administrasi antara desa dan kabupaten, melainkan juga dituntut menjadi penggerak layanan berbasis masyarakat, fasilitator reformasi birokrasi di lini depan, dan koordinator pembangunan kewilayahan

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 tahun 2016 yang diubah terakhir kalinya dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 45/D) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten. Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah tipe A yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Mojowarno mempunyai kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

1. Segenap masyarakat yang berada di lingkup wilayah kerja Kecamatan Mojowarno.

Kelompok penerima layanan kecamatan adalah Masyarakat. dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati

Kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi;

- a) Pelayanan bidang perizinan
- b) Pelayanan bidang non perizinan

Pedoman pelayanan kecamatan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam pasal 4 PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

2. Pemerintahan Desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Mojowarno

Desa yang merupakan kelompok sasaran layanan kecamatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan peran kecamatan, khususnya pada Pasal 154 ayat (1) yang menegaskan bahwa camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Peran ini meliputi fasilitasi dalam penyusunan peraturan desa, administrasi, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan tugas kades dan BPD, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Perangkat Daerah, instansi vertikal serta instansi lintas sektoral yang ada di wilayah kerja Kecamatan Mojowarno

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Mojowarno tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sebagai mitra kerja. Mitra perangkat daerah ini berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Mojowarno, baik dalam aspek pelayanan administrasi pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat.

Adapun mitra perangkat daerah yang menjadi bagian penting dalam pemberian pelayanan Kecamatan Mojowarno meliputi :

1. Forkopimcam

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan Mojowarno maka dibentuklah

Forum Koordinasi kecamatan dimana di dalamnya terdiri dari Camat selaku Ketua Forkopimcam. Kapolsek dan Danramil sebagai anggotanya

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang
Sebagai mitra dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
Dalam pembinaan dan pemberdayaan desa, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Dalam koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta fasilitasi kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
6. Bappeda Kabupaten Jombang
Dalam hal penyelarasan perencanaan pembangunan kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah.
7. Inspektorat Kabupaten Jombang
Sebagai mitra pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
8. Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Dalam penyelenggaraan program bantuan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
Sebagai mitra dalam mendukung pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi, serta penyebarluasan informasi publik.
10. Perangkat Daerah Teknis Lainnya
Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan perangkat daerah merupakan kondisi nyata atau realitas yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan tersebut dirumuskan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja

pembangunan, hasil penjangkauan aspirasi masyarakat, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya. Rumusan permasalahan disusun berdasarkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sementara itu, isu strategis perangkat daerah merupakan pernyataan mengenai hal-hal penting yang menjadi perhatian bersama, baik karena urgensinya, kompleksitasnya, maupun dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Isu strategis merupakan hasil identifikasi terhadap berbagai tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui telaahan terhadap kebijakan nasional, regional, maupun dinamika lingkungan global, serta mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan demikian, identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi dasar bagi Kecamatan Mojowarno dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ke depan. Fokus utama diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, khususnya dalam mendukung misi Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, serta penjangkauan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan Mojowarno. Permasalahan-permasalahan ini merupakan refleksi dari adanya kesenjangan antara kondisi aktual pelayanan yang tersedia dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojowarno umumnya berkaitan dengan masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, serta belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan antara kecamatan dengan desa. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan semakin meningkat, sementara kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas aparatur masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, masih ditemukan kurang optimalnya peran lembaga desa seperti BUMDesa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa. Permasalahan tersebut turut diperparah dengan keterbatasan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh kecamatan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Permasalahan-permasalahan ini merupakan permasalahan yang bersifat dominan dan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis digital.

Kecamatan Mojowarno merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lemahnya pemahaman aparatur desa	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Minimnya pelatihan, pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap aparatur desa terkait regulasi dan administrasi desa
2	Kualitas SDM aparatur	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	Kompetensi SDM belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3	Sarana dan prasarana pelayanan publik	belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan	Terbatasnya anggaran dan perencanaan pembangunan gedung kantor, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana secara

			terpadu
4	Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public	Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital
5	Sistem informasi pelayanan publik	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa	Belum tersedianya platform data bersama, belum ada kebijakan integrasi sistem, Minimnya infrastruktur digital serta keterampilan penggunaan teknologi informasi di tingkat desa
6	Pemberdayaan lembaga desa	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa/kelurahan sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya	Minimnya peran kecamatan dalam pendampingan kelembagaan desa dan belum ada sinergi program pemberdayaan lintas sektor

2.2.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025, yaitu **H. Warsubi, S.H., M.Si.** dan **H. Salmanuddin, S.Ag., M.PD.**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD bersumber dari Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun ke depan. Visi Pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Bahwasanya untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Jombang tersebut, Kecamatan Mojowarno sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan aktif dalam mendukung pencapaian **Misi ke-5**, yaitu: **“Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif”** Transformasi tata kelola pemerintahan ini diselenggarakan melalui transformasi digital dan perluasan partisipasi publik. Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalamnya. Selain itu, menciptakan kebijakan publik dan membangun perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta aparatur sipil negara yang profesional, juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Tujuan dari misi kelima adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”**, yang diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Jombang yang terus meningkat. Sementara itu, **sasaran pembangunan** atau kondisi yang diharapkan terjadi saat tujuan pembangunan di atas tercapai adalah **“Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif”**, yang merupakan sasaran ketiga pada tujuan pembangunan kelima.

Selaras dengan tujuan pembangunan tersebut, Kecamatan Mojowarno menetapkan **Tujuan Perangkat Daerah** yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** Untuk mendukung pencapaian tujuan

tersebut, **Sasaran Strategis** Kecamatan Mojowarno ditetapkan sebagai berikut **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ”** dan **“ Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, berikut dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah :

a. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan kompetensi dan kapasitas SDM kecamatan dan desa dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis ICT (Information and Communication Technology)
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat kecamatan
- 3) Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik antara kecamatan dan desa
- 4) Lemahnya pembinaan desa terhadap lembaga desa seperti BUMDesa dan lembaga pemberdayaan masyarakat
- 5) Rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam pelayanan publik

b. Faktor pendorong

- 1) Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi
- 2) Dukungan program pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sarana prasarana
- 3) Adanya arah kebijakan penguatan transformasi digital di pemerintahan daerah
- 4) Ketersediaan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas pelayanan publik

2.2.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, dapat diidentifikasi sejumlah faktor

penghambat yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, khususnya di Kecamatan Mojowarno yaitu Keterbatasan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan, Ketidakseimbangan Persebaran Sarana Pelayanan, Belum Optimalnya Integrasi Perencanaan Tata Ruang dengan Pengembangan Pelayanan, Keterbatasan SDM dalam Mendukung Pelayanan Digital, Tantangan Sosial Ekonomi (Kemiskinan dan Stunting).

Faktor pendorong yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, khususnya di Kecamatan Mojowarno meliputi: Dukungan Kebijakan RTRW sebagai Kawasan Pendukung Pusat, Arah Pembangunan yang Berbasis Pemerataan Wilayah, Dukungan Isu KLHS terkait Peningkatan SDM dan Pengurangan Kemiskinan, Transformasi Digital dalam Pelayanan Pemerintahan, Potensi Implementasi Desa Digital

2.2.4. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan. sasaran. strategi. kebijakan. program dan kegiatan OPD. maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD.

Kecamatan Mojowarno merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. oleh sebab itu maka peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Mojowarno. baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan. fasilitasi kegiatan sosial ekonomi. pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama

Tabel 2.9 Kertas Kerja Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Lemahnya pemahaman aparaturnya desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia				Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan					
	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan		Kemiskinan dan Stunting		Kemiskinan perdesaan	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik					
	Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa					
	Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa/kelurahan sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya		Kemiskinan dan Stunting	Kurang berkembangnya BUMDesa dan BUMDesma	Kemiskinan perdesaan	Peran BUMDesa. BUMDesma. Lembaga dan pemberdayaan desa/kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa
					1. Penguatan wawasan kebangsaan 2. Berkembangnya intoleransi	Penguatan wawasan kebangsaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Mojowarno daerah secara keseluruhan. Tujuan Renstra merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran Kabupaten Jombang, Yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan yang ada di kecamatan Mojowarno. Sasaran Renstra merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025 -2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025, yaitu **H. Warsubi, S.H., M.Si.** dan **H. Salmanuddin, S.Ag., M.PD.**

Bahwasanya untuk mewujudkan **visi** Bupati dan Wakil Bupati Jombang “ **Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua** “ Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka **misi** pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan Berkeadilan
4. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan Local
5. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif

Berdasarkan pokok-pokok visi yang ingin dicapai serta lima misi yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 di atas, kecamatan Mojowarno mendukung **misi ke 5** (lima) yaitu “

Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif ” Untuk mencapai misi tersebut, maka ditetapkan Tujuan :

1. Tujuan dari misi kesatu adalah “Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kesejahteraan sosial yang merata”
2. Tujuan dari misi kedua adalah “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”
3. Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatnya Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan”
4. Tujuan dari misi keempat adalah “Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal
5. Tujuan dari misi kelima adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”

Dari Tujuan tersebut Kecamatan Mojowarno mendukung Tujuan dari misi kelima adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital”** yang diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Jombang yang terus meningkat.

Sementara itu, sasaran pembangunan atau kondisi yang diharapkan terjadi saat tujuan pembangunan di atas tercapai adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing
2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor unggulan
4. Meningkatnya investasi daerah
5. Meningkatnya pemerataan pendapatan kelompok masyarakat menengah dan perdesaan
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman
7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
8. Meningkatnya pelayanan infrastruktur perhubungan
9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
10. Terwujudnya kenyamanan dan kesalehan sosial dalam masyarakat
11. Terwujudnya transformasi birokrasi berbasis digital
12. Terbangunnya perilaku birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional

13. Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

Dari sasaran tersebut Kecamatan Mojowarno mendukung sasaran ke 13 yaitu **“Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif”** yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang meningkat.

Dari Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang, diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Renstra OPD. Dalam mendukung sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojowarno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan”** Dimana untuk mengetahui keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan.

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Mojowarno didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel. bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Norma. standar. prosedur. dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

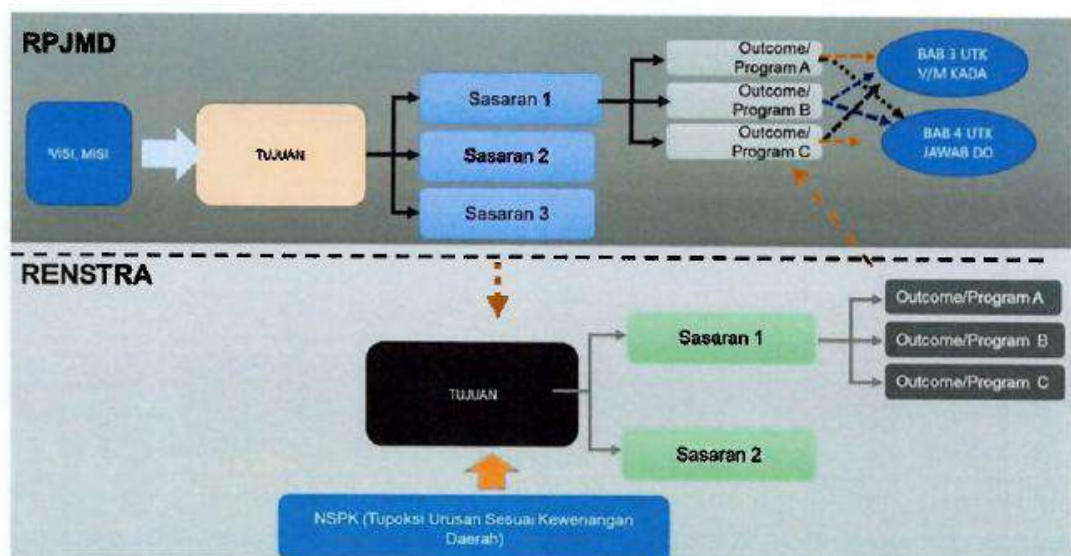
Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan. penerapan. monitoring. pengendalian. evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal

merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Mojowarno diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025- 2029

RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi pembangunan daerah dalam periode 5 tahun (sesuai dengan masa jabatan kepala daerah). RPJMD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, tujuan, sasaran, serta program yang harus dicapai oleh pemerintah daerah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan di tingkat kecamatan Renstra Kecamatan yang mengacu pada sasaran RPJMD akan memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan tetap konsisten dengan arah pembangunan daerah yang lebih luas, sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 4.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 menggunakan prinsip cascading, yaitu penjenjangan logis dari visi dan misi kepala daerah ke dalam sasaran RPJMD, yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, termasuk indikator kinerja dan program. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan akan terintegrasi secara vertikal dan horizontal, serta mendukung pencapaian outcome pembangunan nasional secara terarah

Memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025- 2029. Kecamatan Mojowarno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan di Kecamatan”** Dimana untuk mengetahui keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan. Sedangkan untuk **Sasaran Kecamatan** Mojowarno ditetapkan 2 sasaran yaitu :

- 1) **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik
- 2) **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif** dengan indicator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hal diatas maka pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Mojowarno beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	75,10	75,20	75,30	75,40	75,50	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8,54	8,55	8,56	8,57	8,59	8,60	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,94	76,95	76,96	76,97	76,98	76,99	

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam konteks pengembangan daerah sesuai dengan pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026-2030, fokus strategi Kecamatan Mojowarno diarahkan pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif. Strategi ini bertumpu pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan pelayanan, serta pengembangan sistem administrasi dan pengawasan yang berbasis digital dan partisipatif.

Untuk mendukung implementasi strategi dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap, disusunlah penahapan pembangunan tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan masing-masing tahun selama periode 2025–2029. Penahapan ini memberikan gambaran fokus capaian tahunan Perangkat Daerah, baik dalam konteks peningkatan kinerja pelayanan, penguatan kelembagaan, maupun dukungan terhadap kebijakan prioritas daerah. Penahapan dilakukan secara bertingkat dan logis, dimulai dari fondasi penguatan sistem dan kapasitas internal, lalu dilanjutkan dengan ekspansi pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengaruh eksternal kecamatan dalam koordinasi kewilayahan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif.	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan.	Optimalisasi tata kelola urusan pemerintahan umum yang terkoordinasi melalui penguatan peran Forkopimcam dan penguatan integritas sosial masyarakat.	Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Pembangunan gedung kantor sesuai standart, Penataan ruang pelayanan yang nyaman, penyediaan sarana digital, serta optimalisasi layanan PATEN menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan publik juga diperkuat untuk memastikan transparansi dan responsivitas layanan.	Penguatan partisipasi dan kapasitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, karang taruna, RT/RW, serta posyandu Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk menjadi instrumen ekonomi lokal yang mendukung kemandirian desa. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan juga menjadi fokus, sebagai upaya mendorong perencanaan yang inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.	Menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kewilayahan dengan memperkuat peran dan sinergi antarinstitusi yang tergabung dalam struktur pemerintahan kewilayahan, seperti unsur kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban ditingkatkan melalui penguatan mekanisme komunikasi internal serta pelaksanaan forum koordinasi yang terjadwal dan responsif terhadap dinamika sosial.	Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif, terutama dalam merespons isu-isu sosial, menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. sinergi antarinstitusi seperti kecamatan, kepolisian sektor, koramil, dan unsur keagamaan untuk menyatukan langkah kebijakan di wilayah. Selain penguatan koordinatif, strategi ini juga mencakup pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan dialog kebangsaan bersama tokoh masyarakat, pelajar, pemuda, dan organisasi sosial.	Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembinaan dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola desa. Kecamatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berjalan akuntabel dan transparan.
--	---	--	--	---

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Arah kebijakan Perangkat Daerah merupakan rangkaian kebijakan operasional yang disusun untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Mojowarno agar selaras dengan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jombang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025–2029.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mojowarno berpedoman pada pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait urusan pemerintahan di bidang kewilayahan. NSPK menjadi acuan bagi Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.

Penerapan NSPK dilakukan melalui penyesuaian berbagai aspek teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini antara lain mencakup penyesuaian terhadap standar waktu penyelesaian pelayanan administrasi, penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai dengan ketentuan pusat, pengelolaan layanan administrasi terpadu (PATEN) yang mencakup jenis layanan wajib, serta prosedur pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan. Seluruh aspek tersebut mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian sektoral lainnya, termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Implementasi NSPK tersebut dijalankan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang, khususnya pada kebijakan yang mendorong restrukturisasi kebijakan daerah agar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi operasionalisasi NSPK diarahkan untuk mendukung terwujudnya sinergitas antarunit kerja dalam lingkungan kecamatan, memperkuat kolaborasi antara kecamatan dengan desa serta lintas sektor kewilayahan, dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Mojowarno terselenggara secara konsisten, transparan, dan sesuai standar nasional.

Tabel 3.3

Tehnik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti standar waktu pelayanan, alur SOP pelayanan, jenis layanan PATEN, dan prosedur pelibatan masyarakat	Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.	Penguatan sinergi antarunit internal kecamatan dan kolaborasi lintas sektor di tingkat kewilayahan melalui forum koordinasi, integrasi pelayanan berbasis digital dengan Langkah konkret berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang	

			pelayanan, pembangunan gedung kantor baru, peralatan digital, serta fasilitas pendukung. 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. 3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa. 4. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes). 5. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman. 6. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. 7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat, terutama pemuda, tokoh masyarakat, dan lembaga desa. 8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa. 9. Penguatan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang berorientasi pada akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang mencakup penguatan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, dan pengawasan.	
--	--	--	---	--

Rumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA			
Misi: Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan di tingkat kecamatan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan sistem pelayanan administratif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, pembangunan gedung kantor baru, peralatan digital, serta fasilitas pendukung.
			2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
		2. Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif	1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
			2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDDes, dan APBDDes).
			3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
		3. Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan	1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman.
			2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

		4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	1. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP	1. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait bimbingan, sosialisasi, atau internalisasi rutin Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			2. Peningkatan integritas, disiplin, dan etos kerja aparatur Kecamatan melalui penerapan sistem pembinaan disiplin ASN, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik
			3. Penguatan sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi atas tindak lanjut hasil audit, revidu, dan pengawasan lainnya
			4. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan, monitoring, evaluasi sekaligus analisis capaian kinerja ASN
		2. Memperkuat Budaya Akuntabilitas di Lingkungan Kecamatan termasuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja	1. Meningkatkan kualitas regulasi internal terkait reward and punishment yang mendorong penerapan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan hasil kerja nyata

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

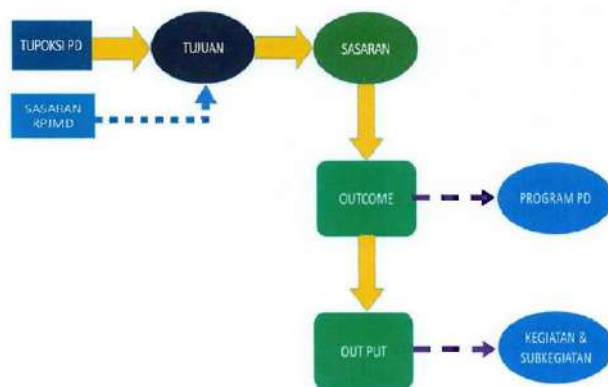
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan, sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Mojowarno guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta indikatornya pada Renstra Kecamatan Mojowarno tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa waktu penyusunan dokumen RPJMD ini dilaksanakan pada saat APBD tahun 2025 telah berjalan, maka periode dalam tabel tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah tahun 2026-2030. Pencantuman target pembangunan tahun 2030 merupakan upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah, dimana kinerja tahun 2030 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2034.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD



Kecamatan Mojowarno memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan dinamika pembangunan dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan reformasi tata kelola pemerintahan melalui restrukturisasi organisasi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas aparatur agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Program dan kegiatan yang disusun dalam kerangka Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan prioritas pada pelayanan publik yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, program tersebut juga difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan tata kelola manajemen SDM dan keuangan, serta peningkatan kualitas kebijakan teknis operasional perangkat daerah.

Seluruh program dirancang berbasis kinerja yang terukur, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan ketercapaian target serta perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Kecamatan Mojowarno berkomitmen untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, sehingga mampu menjamin capaian kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Implementasi program ini merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Kecamatan Mojowarno dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Program merupakan instrumen perencanaan kinerja yang menjabarkan strategi dan arah kebijakan organisasi ke dalam bentuk kumpulan kegiatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program memiliki fungsi sebagai kerangka kerja operasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap program disusun dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari program yang bersifat lebih operasional, konkret, dan terukur. Setiap kegiatan mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui hasil yang dapat diukur

secara jelas. Sedangkan Sub Kegiatan adalah rincian operasional dari suatu kegiatan yang merupakan bagian terkecil dalam struktur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sub kegiatan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan yang lebih bersifat teknis dan berorientasi langsung pada pencapaian keluaran (output) tertentu, Sub kegiatan merupakan unit terkecil yang menjadi dasar perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahunan

Program, kegiatan, dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif merupakan turunan langsung dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dilakukan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan strategis dengan implementasi operasional. Setiap program diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui indikator dan target kinerja yang terukur, serta didukung oleh alokasi anggaran yang sesuai, sehingga dapat menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan

Berikut Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Mojowarno :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- Subkegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Subkegiatan 3. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- Subkegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Subkegiatan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- Subkegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Kegiatan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- Subkegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- Bangunan Kantor
- Subkegiatan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkegiatan 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - Subkegiatan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan 5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- Subkegiatan 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan 6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- Subkegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan 7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- Subkegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Subkegiatan 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***
- Subkegiatan 1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Subkegiatan 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai***

Penugasan Kepala Daerah

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
| Subkegiatan | 2 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|-------------|---|--|

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- | | | |
|-------------|---|---|
| Subkegiatan | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- | | | |
|-------------|---|--|
| Subkegiatan | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
|-------------|---|--|

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dan terukur, yang diturunkan dari rumusan tujuan, sasaran, outcome, dan output kinerja perangkat daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini sepenuhnya mengacu pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta pemutakhiran regulasinya, khususnya terkait integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian, seluruh unsur program dan subkegiatan memiliki dasar hukum dan teknis yang sahih serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah

Rangkaian program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara bertahap

dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, tahun 2030 diposisikan secara eksplisit sebagai tahun penguatan keberlanjutan, sekaligus menjadi landasan awal bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030. Program dan kegiatan pada tahun tersebut diarahkan untuk memastikan konsistensi arah kebijakan, menjaga kesinambungan pelaksanaan program strategis, dan menjadi titik transisi menuju siklus perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Dengan demikian, dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi acuan lima tahunan, tetapi juga memberikan pondasi yang kuat bagi kesinambungan dan integrasi perencanaan tahunan secara utuh dan terpadu. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan				Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kualitas Pelayanan Publik		
		Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Kecamatan Mojowarno		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya kinerja aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mojowarno		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
		Meningkatnya kinerja aspek ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mojowarno		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			Terlaksananya Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.01.04.2.02.0001	Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Mojowarno		Capaian Nilai aspek penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
			Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.01.05.2.01.0003	Subkegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008	Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		Meningkatnya kinerja aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Mojowarno		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya pengumpulan data statistic sektoral daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	7.01.01.2.01.0009	Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
			Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0002	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0006	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0009	Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan /Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Mojowarno Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025- 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				8.860.688 .128		3.282.000. 000		3.156.600. 000		3.257.200 .000		3.255.800. 000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.575.857 .128		2.850.500. 000		2.719.600. 000		2.814.700 .000		2.807.300. 000		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,4	77,55	8.575.857 .128	77,6	2.850.500. 000	77,8	2.719.600. 000	78	2.814.700 .000	78,1	2.807.300. 000	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Mojowarno	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.178.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	6.178.000	5	7.000.000	5	7.500.000	5	8.000.000	5	8.500.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		3		2		2		3			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	10	10		10		10		10		10			

	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)													
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.978.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.978.000	3	5.500.000	2	6.000.000	2	6.500.000	3	7.000.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	700.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.323.518.828		2.345.000.000		2.365.000.000		2.385.000.000		2.405.000.000		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	1	2.323.518.828	1	2.345.000.000	1	2.365.000.000	1	2.385.000.000	1	2.405.000.000		

	Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16		16		16		16		16			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.240.420.828		2.260.000.000		2.280.000.000		2.300.000.000		2.320.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	16	2.240.420.828	16	2.260.000.000	16	2.280.000.000	16	2.300.000.000	16	2.320.000.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				82.398.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		84.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	82.398.000	12	84.000.000	12	84.000.000	12	84.000.000	12	84.000.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	700.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

Tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	16	16	9.600.000	16	10.000.000	16	10.000.00 0	16	10.000.00 0	16	10.000.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.600.000		10.000.000		10.000.00 0		10.000.00 0		10.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	16	16	9.600.000	16	10.000.000	16	10.000.00 0	16	10.000.00 0	16	10.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				108.083.2 50		115.500.00 0		118.100.0 00		120.700.0 00		123.800.00 0		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	108.083.2 50	2	115.500.00 0	2	118.100.0 00	2	120.700.0 00	2	123.800.00 0		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17	29		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				3.202.600		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		

Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	3.202.600	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.668.650		12.000.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	10.668.650	16	12.000.000	16	13.000.000	16	14.000.000	16	15.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				62.358.000		63.000.000		63.500.000		64.000.000		65.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	62.358.000	1	63.000.000	1	63.500.000	1	64.000.000	1	65.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.310.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	3.310.000	2	3.500.000	2	4.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.352.000		2.500.000		2.600.000		2.700.000		2.800.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	2.352.000	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.700.000	1	2.800.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.192.000		26.500.000		27.000.000		27.500.000		28.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	17	29	26.192.000	30	26.500.000	30	27.000.000	30	27.500.000	30	28.000.000		

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.971.994.650		200.000.000		100.000.000		100.000.000		60.000.000		
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	136	5.971.994.650	10	200.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	60.000.000		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		-		-		-		-			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.880.500.000		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	5.880.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.494.650		200.000.000		100.000.000		100.000.000		60.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	136	91.494.650	10	200.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	60.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.180.000		119.000.000		62.000.000		131.000.000		137.000.000		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	105.180.000	24	119.000.000	24	62.000.000	24	131.000.000	24	137.000.000		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.540.00 0		50.000.000		55.000.00 0		60.000.00 0		65.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	36.540.00 0	24	50.000.000	24	55.000.00 0	24	60.000.00 0	24	65.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				68.640.00 0		69.000.000		7.000.000		71.000.00 0		72.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	24	68.640.00 0	24	69.000.000	24	7.000.000	24	71.000.00 0	24	72.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.302.40 0		54.000.000		57.000.00 0		60.000.00 0		63.000.000		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	51.302.40 0	3	54.000.000	3	57.000.00 0	3	60.000.00 0	3	63.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7		7		7		7		7			

	(Unit)													
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				31.171.00 0		32.000.000		33.000.00 0		34.000.00 0		35.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	7	31.171.00 0	7	32.000.000	7	33.000.00 0	7	34.000.00 0	7	35.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.471.40 0		12.000.000		13.000.00 0		14.000.00 0		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	10.471.40 0	3	12.000.000	3	13.000.00 0	3	14.000.00 0	3	15.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.660.000		10.000.000		11.000.00 0		12.000.00 0		13.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	10	9.660.000	10	10.000.000	10	11.000.00 0	10	12.000.00 0	10	13.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.800.000		11.000.000		12.500.00 0		14.000.00 0		15.500.000		
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	-	76,5	9.800.000	77	11.000.000	77,5	12.500.00 0	78	14.000.00 0	78,5	15.500.000	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Mojowarno	

Kecamatan Mojowarno														
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				9.800.000		11.000.000		12.500.000		14.000.000		15.500.000		
Meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	9.800.000	12	11.000.000	12	12.500.000	12	14.000.000	12	15.500.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4.000.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	4	4.000.000	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.800.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12	12	5.800.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000		

	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				164.902.500		165.500.000		166.500.000		167.500.000		168.500.000		
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	-	75,5	164.902.500	76	165.500.000	76,5	166.500.000	77	167.500.000	77,5	168.500.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mojowarno	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				164.902.500		165.500.000		166.500.000		167.500.000		168.500.000		
Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	114	114	164.902.500	114	165.500.000	114	166.500.000	114	167.500.000	114	168.500.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				17.000.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	114	114	17.000.000	114	17.500.000	114	18.000.000	114	18.500.000	114	19.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas				147.902.500		148.000.000		148.500.000		149.000.000		149.500.000		

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	147.902.500	4	148.000.000	4	148.500.000	4	149.000.000	4	149.500.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7.950.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	-	49,5	7.950.000	50	8.000.000	50,5	8.500.000	51	9.000.000	51,5	9.500.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Mojowarno	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7.950.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		
Terlaksananya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	7.950.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	9.500.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				7.950.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	7.950.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	9.500.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				81.316.00 0		226.000.00 0		227.500.0 00		229.000.0 00		231.000.00 0		
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	75,5	81.316.00 0	76	226.000.00 0	76,5	227.500.0 00	77	229.000.0 00	77,5	231.000.00 0	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Mojowarno	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				81.316.00 0		226.000.00 0		227.500.0 00		229.000.0 00		231.000.00 0		
Terselenggaranya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	81.316.00 0	4	226.000.00 0	4	227.500.0 00	4	229.000.0 00	4	231.000.00 0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	45	45		45		45		45		45			
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				28.216.00 0		172.000.00 0		173.000.0 00		174.000.0 00		175.000.00 0		
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	45	45	28.216.00 0	45	172.000.00 0	45	173.000.0 00	45	174.000.0 00	45	175.000.00 0		

7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				53.100.00 0		54.000.000		54.500.00 0		55.000.00 0		56.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	53.100.00 0	4	54.000.000	4	54.500.00 0	4	55.000.00 0	4	56.000.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.862.50 0		21.000.000		22.000.00 0		23.000.00 0		24.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mojowarno	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	-	75,5	20.862.50 0	76	21.000.000	76,5	22.000.00 0	77	23.000.00 0	77,5	24.000.000	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Mojowarno	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				20.862.50 0		21.000.000		22.000.00 0		23.000.00 0		24.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	38	38	20.862.50 0	38	21.000.000	38	22.000.00 0	38	23.000.00 0	38	24.000.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20.862.50 0		21.000.000		22.000.00 0		23.000.00 0		24.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	38	38	20.862.50 0	38	21.000.000	38	22.000.00 0	38	23.000.00 0	38	24.000.000		

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program terpilih yang secara teknokratik memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, melalui strategi serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program prioritas ini merupakan elaborasi dari program utama pendukung tujuan dan sasaran RPJMD, di mana program dan subprogram prioritas Kepala Daerah wajib diimplementasikan sepanjang periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel 4.3 :

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

Pada Tabel diatas disajikan daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, Kecamatan Mojowarno tidak menetapkan subkegiatan prioritas (nihil), karena program prioritas pembangunan daerah (Asta Cita Bupati Jombang) berada dalam kewenangan perangkat daerah teknis. Peran kecamatan lebih difokuskan sebagai perangkat daerah pendukung yang bertugas memfasilitasi, mengoordinasikan, serta mengawal pelaksanaan program prioritas tersebut

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai se hubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LkjlP Tahunan

Indikator kinerja Kecamatan Mojowarno secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2025-2029. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojowarno

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET ERA NGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.12 .0000 - Kecamatan Mojowarno									
2.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	-	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8,53	8,54	8,55	8,56	8,57	8,59	8,6	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	76,93	76,94	76,95	76,96	76,97	76,98	76,99	

Untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029, telah dirumuskan target-target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mendukung secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Target kinerja yang ditetapkan melalui IKK dirancang secara sistematis dan terukur sesuai dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Penetapan target IKK mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terutama dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan adanya target-target yang terukur melalui IKK, perangkat Kecamatan Mojowarno diharapkan memiliki arah yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengendalian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini juga menjadi instrumen penting dalam proses evaluasi kinerja tahunan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Mojowarno

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	positif	Indeks	-	75	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada amanat regulasi yang berlaku, Hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah, provinsi, nasional, serta perangkat daerah terkait serta sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Seluruh substansi Renstra telah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya, isu-isu strategis aktual, serta proyeksi kebutuhan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan Mojowarno.

Pelaksanaan Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Mojowarno, yang akan disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dan dokumen perencanaan terkait lainnya, guna menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi tersebut menjadi bagian integral dari siklus manajemen kinerja perangkat daerah, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk penyempurnaan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Kecamatan Mojowarno dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah

yang jelas dan terukur dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan kecamatan selama lima tahun ke depan, agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Selain sebagai pedoman, dokumen Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojowarno kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, guna menjamin bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilakukan memiliki landasan perencanaan yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan

Demikian semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029 Kecamatan Mojowarno dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaannya



Mojowarno, 19 September 2025

Pt. CAMAT MOJOWARNO

M. RONNY AFRIANDIE., S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 198105231999121001